

# Evaluasi kebijakan pendidikan dan peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Arida Ulul Azmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: aridaazmi@gmail.com

## Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan, Evolusi Historis, UU No. 20 Tahun 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Kualitas Pendidikan

## Keywords:

Education Policy, Historical Evolution, Law No. 20 of 2003, School-Based Management, Education Quality

## ABSTRAK

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan peralihan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan seperti pendidikan berbasis agama, pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan efisiensi manajemen (Anjelina et al., 2021). Pada era reformasi, pendidikan mengalami demokratisasi melalui kebijakan seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan partisipasi komunitas, yang bertujuan mendekatkan pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah dan masyarakat (Rozak, 2021).

Perubahan kebijakan lain mencakup penghapusan EBTA dan penerapan UAS serta UN sebagai upaya peningkatan mutu, serta pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas pendidikan (Rozak, 2021). Studi ini menyoroti dinamika evolusi kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap sistem pendidikan nasional.

## ABSTRACT

Education policy in Indonesia underwent significant transformation with the shift from Law No. 2 of 1989 to Law No. 20 of 2003. This transition was driven by the need to address challenges such as religion-based education, equitable access, quality improvement, and management efficiency (Anjelina et al., 2021). During the reform era, education policies embraced democratization through initiatives like School-Based Management (SBM) and community participation, aiming to decentralize decision-making and empower schools and local communities (Rozak, 2021). Other policy changes included the replacement of the National Final Exam (EBTA) with School Final Exams (UAS) and National Exams (UN) to enhance quality, alongside a shift from quantity-focused to quality-oriented education (Rozak, 2021). This study highlights the dynamics of education policy evolution and its implications for the national education system.

## Pendahuluan

Pendidikan adalah elemen fundamental dalam pembangunan suatu negara, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, kesehatan, dan agama. Pendidikan berperan sebagai kunci untuk kemajuan dan daya saing suatu bangsa di era globalisasi. Peran pendidikan sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai metode atau strategi yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan tertentu, dengan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memperhatikan dan memenuhi berbagai tuntutan serta kebutuhan masyarakat terkait tujuan tersebut. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari suatu organisasi, yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian langkah strategis yang diambil dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik secara umum, kebijakan pendidikan secara khusus mengatur penyerapan, alokasi, dan distribusi sumber daya, serta regulasi perilaku dalam pendidikan.

Dengan kata lain, kebijakan pendidikan adalah kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, termasuk tujuan pendidikan dan cara mencapainya. Kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memandu pengembangan visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan akademik melalui implementasi strategis. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan isu penting dari masyarakat, pemerintah, dan tuntutan zaman. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan rencana tindakan yang sesuai dan dapat diterima sebagai alternatif atau pilihan dalam menangani permasalahan di bidang pendidikan. Secara normatif, kebijakan pendidikan adalah upaya untuk membantu individu berkembang ke tingkat yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka.

## Pembahasan

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat diartikan sebagai kemampuan institusi pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar secara optimal (Agustang, 2021). Kualitas pendidikan dianggap baik jika telah memenuhi dan bahkan melampaui delapan standar pendidikan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Syukri & Farhaini, 2024). Lebih lanjut, kualitas pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan untuk secara efektif mengelola dan memproses pendidikan guna meningkatkan nilai tambah sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas tinggi. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari mutu lulusan, tetapi juga mencakup bagaimana institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Secara sederhana, kualitas pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan keluaran yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pendidikan mencerminkan kondisi di mana pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Konsep kualitas pendidikan bersifat dinamis dan mencakup berbagai aspek di luar prestasi akademik, termasuk sumber daya manusia, kinerja, dan seluruh aspek organisasi atau institusi (Syukri & Farhaini, 2024).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional melalui penetapan kebijakan dan standar nasional. UU No. 20 Tahun 2003 mengatur standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Selain itu, undang-undang ini menekankan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung.

### **Evolusi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Perspektif Historis**

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Peralihan ke UU No. 20 Tahun 2003 didorong oleh kebutuhan untuk menangani berbagai isu, seperti pendidikan agama sebagai dasar pendidikan, pemerataan kesempatan, kualitas dan relevansi, serta efisiensi manajemen, yang dianggap tidak lagi memadai di bawah undang-undang sebelumnya (Anjelina et al., 2021).

Di era reformasi, pendidikan mengalami demokratisasi melalui pedoman seperti manajemen berbasis sekolah (MBS) dan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan untuk membawa pendidikan lebih dekat ke sekolah dan masyarakat. Aplikasi model MBS didasarkan pada beberapa asumsi. Sistem intensif pendidikan yang telah diimplementasikan sejauh ini belum menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kebijakan pendidikan membutuhkan sekolah sebagai sistem untuk mempertimbangkan halaman input, tetapi sejauh ini berfokus pada input dan output. Model proses dan output MBS dianggap tepat dan sesuai dengan semangat otonomi lokal yang saat ini diterapkan, memberikan lebih banyak peluang dan kebebasan bagi sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah-sekolah pembangunan sesuai dengan kondisi dan kemungkinan masing-masing wilayah. (Mas, n.d.)

Partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pendidikan bertujuan untuk memeriksa alasan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, hubungan sekolah-ke-komunitas, dan penguatan masyarakat melalui dewan sekolah dan dewan sekolah. Peran komunitas oleh dewan sekolah dan dewan sekolah memiliki posisi strategis untuk mengembangkan tugas masyarakat. Lingkungan manajemen sekolah ditandai dengan kepemilikan sekolah, pengembangan kebijakan sekolah, pengembangan sadar sekolah, perhatian terhadap atmosfer akademik, dan pengembangan standar operasional sekolah.

Beberapa perubahan kebijakan historis yang signifikan mencakup penghapusan Ujian Akhir Nasional (EBTA) dan penggantian dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS) serta Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, terdapat pergeseran fokus dari penekanan pada kuantitas pendidikan menuju peningkatan kualitas.

## Mengurai Kebijakan dan Inisiatif Pendidikan Utama

"Pendidikan adalah tanggung jawab umum antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pada tahun 2003 UU No. 20 sehubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat juga harus memberikan dukungan sumber daya kepada Departemen Pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan mencakup partisipasi individu, kelompok, keluarga, asosiasi profesional, pengusaha dan organisasi sosial dalam implementasi dan manajemen kualitas layanan pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai sumber, penegak dan pengguna hasil pendidikan. Selain itu, Pasal 56 Undang -Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrassa dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan(Sugiarti, 2023).

Sebagai lembaga independen, Dewan Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan memberikan pengujian, manajemen dan dukungan personel, lembaga dan infrastruktur, dan memberikan pengawasan pendidikan di tingkat nasional, negara bagian, dan kabupaten/kota tanpa hubungan hierarkis. Komite Sekolah/Madrassa sebagai lembaga independen memainkan peran dalam meningkatkan kualitas layanan dan penyediaan kualitas dan pertimbangan layanan, bimbingan dan dukungan, serta penyediaan staf, lembaga dan dukungan infrastruktur, serta pengawasan layanan di tingkat pendidikan. Tujuan dari Dewan Sekolah (1) Upaya dan Inisiatif Komunitas dalam Kelahiran Pedoman Perusahaan dan Program Pendidikan Unit Pendidikan adalah (2) Tanggung Jawab dan Peran Masyarakat dalam Administrasi Pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. (Sugiarti, 2023)

Inisiatif "Merdeka Belajar" merupakan kebijakan terobosan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dengan tujuan mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Merdeka Belajar" menekankan fleksibilitas untuk mengatasi keberagaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan di berbagai sekolah. (Rusdiana, 2015) Inisiatif ini dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan mampu bersaing, memberikan kebebasan dan teknik terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. (Magdalena et al., 2022) Fokusnya adalah pada keterampilan fondasional (literasi, numerasi, dan 6 karakter Profil Pelajar Pancasila) dengan konten yang lebih sedikit namun lebih mendalam. Pembelajaran terdiferensiasi, pencapaian pembelajaran berbasis fase lintas tahun, dan pembelajaran berbasis proyek juga ditekankan. "Merdeka Belajar" mencakup 21 episode yang meliputi berbagai aspek mulai dari asesmen nasional hingga pendanaan pendidikan tinggi(Anjelina et al., 2021b). Optimalisasi manajemen pembelajaran menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka, karena melalui pengelolaan yang efektif, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik(Zuhriyah et al., 2024).

Aspek-aspek kunci termasuk penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN), Ujian Sekolah (USBN) yang diselenggarakan oleh sekolah, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel.(Magdalena et al., 2022) Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan, menjadikan belajar sebagai hobi, dan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Rohmatika, 2023) Kebijakan ini mendorong sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing serta menciptakan lingkungan belajar inklusif yang menghargai perbedaan.(Rohmatika, 2023)

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 memfokuskan pada kebijakan "Merdeka Belajar" sebagai pedoman pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah mengelola dan memaksimalkan bonus demografi untuk mencapai bangsa maju yang adil dan makmur. Rencana ini melanjutkan upaya dari tahun 2015-2019 untuk memperluas akses, memeratakan mutu, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Program-program spesifik mencakup perluasan PAUD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan pembangunan infrastruktur. Fokus juga diberikan pada penjaminan mutu melalui akreditasi dan peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan.(Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, N.D.)

Upaya penelitian dan pengembangan terkait akses, mutu, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas publik juga menjadi bagian penting. Pendidikan karakter ditekankan sebagai pilar pembangunan bangsa. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Tahun 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi, karakter, dan relevansi di semua jenjang pendidikan serta memperkuat sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan utama pada tahun 2024 meliputi penguatan ekosistem pembelajaran, transformasi pembelajaran, penguatan kompetensi guru, percepatan transformasi digital, dan penguatan pendidikan vokasi. (rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024, n.d.)

### **Rekomendasi Untuk Peningkatan Kebijakan: Merancang Arah Untuk Mutu Pendidikan Yang Lebih Baik**

Peningkatan kapasitas dan kesiapan guru dapat dilakukan melalui implementasi program pelatihan berkelanjutan dan komprehensif tentang kurikulum baru seperti "merdeka belajar," dengan fokus pada perubahan pedagogis, teknik penilaian, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.(Nur dalyanti et al., 2024) Menyediakan pendampingan dan dukungan berkelanjutan untuk guru, terutama selama fase awal implementasi kebijakan baru, juga krusal.(Fadhilah et al., 2024) Pemerataan distribusi guru berkualitas ke semua wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal, dapat diupayakan melalui program insentif dan dukungan. Peningkatan kesejahteraan dan kompensasi guru juga penting untuk menarik dan mempertahankan pendidik berkualitas tinggi.

Perbaikan infrastruktur dan sumber daya pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan investasi dalam pembangunan dan pemutakhiran fasilitas pendidikan, terutama di daerah dengan kekurangan infrastruktur. (Tengku Darmansah et al., 2024) Memastikan akses yang adil terhadap teknologi dan koneksi internet untuk semua sekolah dan siswa penting untuk mendukung metode pembelajaran modern. Menyediakan sumber belajar yang memadai, termasuk buku, materi ajar, dan sumber daya digital, untuk semua institusi pendidikan juga diperlukan. (Iqbal et al., 2023)

Peningkatan relevansi dan implementasi kurikulum dapat dilakukan dengan meninjau dan memperbarui kurikulum secara berkelanjutan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan abad ke-21.(tengku darmansah et al., 2024) Mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih praktis dan terapan, menekankan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah, juga penting. Memastikan kejelasan dan konsistensi dalam standar dan pedoman kurikulum akan memfasilitasi implementasi yang efektif di tingkat sekolah.(Iqbal et al., 2023) Memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengadaptasi kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, sambil tetap mempertahankan standar nasional, perlu dipertimbangkan.

Keterlibatan dan kolaborasi pemangku kepentingan dapat ditingkatkan melalui implementasi strategi sosialisasi dan komunikasi kebijakan yang efektif untuk memastikan semua pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, masyarakat) memahami tujuan dan implementasi kebijakan pendidikan.(Fadhilah et al., 2024) Mendorong keterlibatan orang tua yang lebih besar dalam pendidikan anak-anak mereka melalui lokakarya, platform komunikasi, dan proyek kolaboratif juga penting.(Tengku darmansah et al., 2024) memperkuat peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah dan inisiatif peningkatan mutu perlu dilakukan. Mendorong kolaborasi dan keselarasan antar berbagai tingkat pemerintahan dan institusi pendidikan dalam implementasi kebijakan juga krusial.(Zantia & nadila, n.d.)

Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan membangun sistem yang kuat untuk pengukuran hasil belajar secara teratur dan akurat di semua jenjang pendidikan. Melakukan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis terhadap efektivitas kebijakan pendidikan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif juga diperlukan. Memanfaatkan data dari pemantauan dan evaluasi untuk menginformasikan penyesuaian dan perbaikan kebijakan sangat penting.(Zuanda et al., 2024) memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan juga krusial.

Mengatasi kesetaraan dan disparitas dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dan program yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Mengalokasikan sumber daya secara adil untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas, personel, dan materi pembelajaran yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas juga penting.(Tengku darmansah, putri suci ramadhani, et al., 2024) Memperkuat kebijakan pendidikan inklusif untuk memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari komunitas terpinggirkan perlu menjadi prioritas.

Memastikan konsistensi dan stabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan mengupayakan konsistensi dan stabilitas yang lebih besar dalam kebijakan pendidikan untuk menghindari gangguan dan memungkinkan implementasi dan evaluasi jangka panjang yang efektif. Memastikan bahwa perubahan kebijakan didasarkan pada bukti dan diimplementasikan dengan persiapan yang memadai serta konsultasi pemangku kepentingan juga krusial.(Nur dalyanti et al., 2024)

## Kesimpulan dan Saran

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan lanskap yang kompleks dan terus berkembang, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan utama seperti "Merdeka Belajar" menunjukkan pergeseran signifikan menuju otonomi yang lebih besar, pembelajaran berpusat pada siswa, dan pengembangan kompetensi holistik. Delapan Standar Nasional Pendidikan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendefinisikan dan memastikan mutu di seluruh sistem pendidikan. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada dalam hal kesiapan guru, infrastruktur, kesetaraan, dan implementasi kebijakan yang efektif. Perspektif pemangku kepentingan umumnya positif terhadap reformasi seperti "Merdeka Belajar," tetapi keterlibatan dan dukungan berkelanjutan sangat penting.

Kebijakan pendidikan di masa depan harus fokus pada penguatan kapasitas guru, pemerataan perbaikan infrastruktur, memastikan relevansi kurikulum, mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, dan membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat. Mengatasi kesetaraan dan disparitas dalam akses dan mutu akan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mempertahankan konsistensi dan stabilitas kebijakan akan esensial untuk keberhasilan jangka panjang dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang berkelanjutan, berdasarkan data dan umpan balik pemangku kepentingan, akan menjadi kunci untuk merancang arah menuju masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah.

## Daftar Pustaka

- Agustang, A. (2021). *Filosofi Research Dalam Upaya Pengembangan Ilmu*.
- Anjelina, W., Silvia, N., & Gitituati, N. (2021a). Program merdeka belajar, gebrakan baru kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1977–1982. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/dsjpips/article/view/7051>
- Anjelina, W., Silvia, N., & Gitituati, N. (2021b). *Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan*. 5.
- Fadhilah, F. N., Nakhwa, I., Ahmad, F. R., & Ivansyach, R. K. (2024). Tantangan Dan Rekomendasi Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Untuk Optimalisasi Pendidikan Di Indonesia. *Open Access*, 5(7).
- Iqbal, M., Rizki, A., Wardani, J. S., Khafifah, N. P., Silitonga, N., & Amirah, R. (2023). Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar. *Journal on Education*, 5(2), 2257–2265. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.878>

- Magdalena, Winarti, & Yulianti. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(3), 211–216. <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i3.847>
- Mas, S. R. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Penyelengaraan Pendidikan*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2243>
- Nur Dhyanti, Sylvi Marsella Diastami, Azra Humaira, & Tengku Darmansah. (2024). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.545>
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. (N.D.). Jdih.Kemdikbud.Go.Id.
- Rohmatika, D. (2023). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v9i1.3640>
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan pendidikan: Dari filosofi ke implementasi*.
- Sugiarti, T. (2023). Realisasi, evaluasi terhadap kebijakan MBKM di fakultas psikologi universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPP)*, 1(3), 121–132. <https://doi.org/10.61116/jipp.v1i3.215>
- Syukri, M., & Farhaini, N. (2024). Kualitas Pendidikan dan Keunggulan Kompetitif. *Journal on Education*, 6(02), 11738–11747.
- Tengku Darmansah, Anggi Anggraini, Fauzan Azhima Sirait, Nurkhotima Nurkhotima, & Wardah Sahrani Sibarani. (2024). Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 3(1), 94–102. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1457>
- Tengku Darmansah, Putri Suci Ramadhani, Dessy Maslian Br Lubis, & Desi Fitriyani Sembiring. (2024). Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 3(1), 304–313. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1215>
- Zantia, G., & Nadila, S. (n.d.). *Tantangan dan Prospek Kebijakan Pendidikan*.
- Zuanda, S., Fahrezi, D. W., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. 8.
- Zuhriyah, I. A., Padil, M., & Rabbani, I. (2024). Optimalisasi manajemen pembelajaran dalam keberhasilan kurikulum merdeka. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(1), 32–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/19445/>